



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
Nomor : 461A Tahun 2017

T E N T A N G

**PENGELOLA DAN PEMBUAT ARTIKEL
JURNAL "JURISPRUDENTIE VOLUME 4 NO.1(JUNI) DAN 2 (DESEMBER)"
JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM 2017**

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi terselenggaranya **Penerbitan Jurnal pada tingkat Jurusan** yang berdaya guna bagi pengembangan Jurusan dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, maka dipandang perlu adanya **Tim Pengelola dan Pembuat Artikel**;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 8. Keputusan Rektor Nomor 192C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGELOLA DAN PEMBUAT ARTIKEL JURNAL "JURISPRUDENTIE VOLUME 4 NO.1 (JUNI) DAN 2 (DESEMBER)" JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 2017
- Pertama** : Menunjuk Tim Pengelola dan Pembuat Artikel Jurnal Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Kedua** : Tugas Tim Pengelola adalah menyiapkan segala sesuatu demi terselenggaranya penerbitan jurnal. Tugas Pembuat Artikel menuangkan ide atau gagasannya sesuai topik inti pembahasan masing-masing dalam Jurnal "Jurisprudentie" Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBPUIN Alauddin Makassar No. DIPA025.04.2.3073/4/ 2017 tanggal 07 Desember 2016 UIN Alauddin Makassar ;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 3 Mei 2017

Kh. Rektor,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag.
NIP.196210161990031003



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 461A Tahun 2017

T E N T A N G

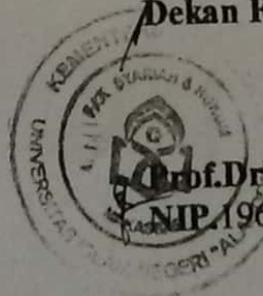
**PENGELOLA DAN PEMBUAT ARTIKEL
JURNAL "JURISPRUDENTIE VOLUME 4 NO.1(JUNI) DAN 2 (DESEMBER)"
JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM 2017**

Pembuat Artikel Volume 4 No.1 (Juni 2017):

Abd. Rais Asmar,SH,MH
Dr. Andi Safriani,SH,MH
Ashabul Kahfi,S.Ag,MH
Erlina,SH,MH
Herman,SH,MH
Istiqamah,SH,MH
Dr. Jumadi,SH,MH
Muhammad Amiruddin,SH,MH
Nurdiyana Tadjuddin,M.Ag
Sakir Sila, SH, MH
St. Nurjannah,SH,MH
Sulastryani,SH,MH
Syafruddin Muhtamar,SH,MH
Rahmatullah,SH,MH

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 3 Mei 2017

**An. Rektor,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 196210161990031003

Abd. Rais Asmar

Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan

Andi Safriani

Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Ashabul Kahfi

Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah

Erlina

Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas.

Herman

Eksistensi Dissenting opinion Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Istiqamah

Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata

Jumadi

Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum

Muh. Amiruddin

Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia di Negara yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon

Nurdiyana Tadjuddin

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Layanan Perusahaan Daerah Air Minum UETanah" Kabupaten Tojo Una Una

Sakir Sila

Aspek Hukum Terhadap Persetujuan Tindakan Medik/kedokteran (Informed Consent) Dalam Kaitannya Dengan Tindakan Medis di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

St. Nurjannah

Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis..

Syafruddin Muhtamar

Batas-Batas Normatif Prinsip Partisipasi Dalam Perundang-Undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Volume

4

Nomor

1

Makassar

Juni 2017

ISSN

2355-9640

PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Kota Makassar)

Abd. Rais Asmar
Universitas Negeri Islam (UIN) Alauddin Makassar
Email: raisevabone@gmail.com

Abstract

The effectiveness of the implementation of Makassar City Regulation No. 9 of 2009 on the Implementation of Population and Civil Administration In Makassar City is strongly influenced by government organizers, society, and the rules. Some aspects of the effectiveness problems of population services in Makassar are access, services and infrastructure, communication, resources, and bureaucratic structure. Therefore, it takes commitment and awareness of the rights and obligations of each party and the optimization of public service system in the field of population of Makassar

Keyword: *Public Service, Population Administration*

Abstrak

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh penyelenggara pemerintahan, masyarakat, dan aturannya. Beberapa aspek permasalahan efektivitas pelayanan bidang kependudukan di Kota Makassar yaitu akses, pelayanan dan sarana prasarana, komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan kesadaran hak dan kewajiban masing-masing pihak serta optimalisasi sistem pelayanan publik bidang kependudukan di Kota Makassar

Kata Kunci: *Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan*